
IDENTIFIKASI MITIGASI BENCANA PADA HOTEL PESISIR: STUDI PADA HOTEL MERUMATTA SENGGIGI

Oleh

Ihyana Hulfa¹, Mahmudah Budiatiningsih²

^{1,2}Universitas Mataram

E-mail: [1ihyanahulfa@unram.ac.id](mailto:ihyanahulfa@unram.ac.id), [2mahmudahb@unram.ac.id](mailto:mahmudahb@unram.ac.id)

Article History:

Received: 11-02-2026

Revised: 28-02-2026

Accepted: 14-03-2026

Keywords:

Disaster Mitigation,
Disaster Resilient Hotels,
Preparedness, Lombok

Abstract: *The coastal area of Lombok lies in the collision zone between the Indo-Australian and Eurasian plates, which has the potential to trigger earthquakes and tsunamis; therefore, the hotel sector in this region is required to implement comprehensive disaster-mitigation measures. This study aims to analyze the disaster-mitigation strategies implemented at Hotel Merumatta Senggigi as an effort to realize the concept of a disaster-resilient hotel. The method used is descriptive qualitative with observation, in-depth interviews, and document study techniques. The analysis is conducted through descriptive qualitative analysis to examine the implementation of structural and non-structural mitigation measures within the hotel environment. The results show that structural mitigation has been implemented through the provision of evacuation routes, assembly points, and an early-warning system. Meanwhile, non-structural mitigation includes the preparation of SOPs for emergency response and regular staff training. However, disaster-information dissemination to guests and integration with local disaster-management agencies remain limited. This study concludes that the hotel's preparedness is already functioning well but needs to be strengthened through tourist education and cross-sectoral collaboration in order to support the realization of a safe, resilient, and sustainable tourism destination*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan destinasi wisata yang melimpah. Namun, secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada di kawasan Ring of Fire, sehingga memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kondisi tektonik yang dinamis tersebut menyebabkan Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di dunia (Wekke, 2021).

Pulau Lombok merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana signifikan sekaligus berperan sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Kawasan pesisir Senggigi, yang menjadi ikon pariwisata Lombok, berada pada zona yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena kedekatannya dengan struktur sesar aktif. Tingginya aktivitas pariwisata di wilayah ini menuntut adanya sistem manajemen risiko yang efektif dan adaptif guna menjamin keselamatan wisatawan serta menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai

sumber penghidupan masyarakat lokal.

Dalam perspektif manajemen risiko, mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif bencana melalui penyediaan informasi kawasan rawan, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat, serta penataan ruang berbasis risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1), pelaksanaan mitigasi mencakup penyediaan informasi dan peta rawan bencana, sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas menghadapi keadaan darurat, serta penataan ruang kawasan rawan bencana (Anggarasari, 2019). Pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan responsif menuju kesiapsiagaan proaktif juga menegaskan pentingnya upaya mitigasi sejak tahap pencegahan (Raja et al., 2017).

Meskipun demikian, implementasi konsep disaster awareness pada sektor perhotelan di Lombok, khususnya kawasan pesisir, masih relatif terbatas dibandingkan daerah lain seperti Bali yang telah lebih dahulu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem operasional hotel. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi pariwisata dalam menerapkan sistem mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu hotel yang berada di kawasan rawan tersebut adalah Hotel Merumatta Senggigi yang berlokasi langsung di garis pantai Senggigi. Posisi geografis ini menjadikan hotel memiliki potensi paparan terhadap gempa bumi dan tsunami, sehingga kesiapsiagaan dan penerapan strategi mitigasi menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan operasional serta menjamin keselamatan wisatawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi mitigasi bencana yang diterapkan oleh manajemen Hotel Merumatta Senggigi Lombok, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata pesisir yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan komponen strategis dalam sistem penanggulangan bencana yang bertujuan mengurangi risiko serta dampak terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa mitigasi dilakukan melalui pembangunan fisik serta peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat, sehingga mencakup dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan yang terintegrasi.

Secara konseptual, mitigasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mitigasi struktural—meliputi pembangunan infrastruktur tahan bencana, penyediaan jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini—serta mitigasi non-struktural yang mencakup edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, dan penguatan kelembagaan lokal (Faturahman, 2018). Adapun bencana di Indonesia diklasifikasikan menjadi bencana alam, non-alam, dan sosial, yang masing-masing memerlukan pendekatan mitigasi berbeda (UU No. 24 Tahun 2007).

Tingginya tingkat kerentanan wilayah Indonesia menjadikan mitigasi sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata dan perhotelan (Wekke, 2021). Dalam konteks tersebut, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata menekankan pentingnya kesiapsiagaan melalui penyusunan SOP kebencanaan, pelatihan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari perlindungan wisatawan dan keberlanjutan destinasi.

Urgensi ini diperkuat oleh temuan Budiatiningsih dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wisatawan terhadap risiko bencana di kawasan wisata pantai masih rendah,

terutama terkait prosedur evakuasi dan titik kumpul aman. Oleh karena itu, integrasi mitigasi bencana ke dalam sistem manajemen hotel menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Konsep Hotel Tangguh Bencana

Konsep hotel tangguh bencana (*disaster-resilient hotel*) menempatkan hotel tidak sekadar sebagai penyedia akomodasi, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem pariwisata yang berkontribusi terhadap ketahanan sosial dan ekonomi destinasi. Kesiapsiagaan hotel diwujudkan melalui perencanaan evakuasi, pembentukan tim tanggap darurat internal, serta koordinasi dengan lembaga kebencanaan seperti BPBD dan Basarnas (Prasetyo, 2020). Prinsip ini sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 yang menekankan kolaborasi multipihak, termasuk sektor swasta, dalam membangun ketangguhan terhadap risiko bencana.

Secara konseptual, hotel tangguh bencana diarahkan pada tiga tujuan utama: mengurangi kerentanan melalui desain dan tata ruang yang aman, menjamin keselamatan tamu dan staf saat bencana, serta memastikan keberlanjutan operasional pascabencana (*business continuity and recovery*). Kerangka ini selaras dengan teori *organizational resilience* yang menekankan kapasitas antisipasi, adaptasi, respons, dan pemulihan (Brown et al., 2017; Dobie, 2019). Implementasinya mencakup mitigasi struktural—seperti penguatan bangunan, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini, serta mitigasi non-struktural berupa penyusunan SOP, pelatihan rutin, simulasi evakuasi, dan penyediaan informasi keselamatan bagi tamu (Haddow et al., 2011; Faturahman, 2018).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kesiapsiagaan hotel di Indonesia masih bersifat parsial. Penelitian di Anyer mengidentifikasi keterbatasan SOP dan sosialisasi kepada tamu (Wulung & Abdullah, 2021), sementara studi di Bali dan Yogyakarta menemukan bahwa pelatihan serta dokumentasi mitigasi belum terintegrasi secara sistematis dalam manajemen operasional (Suryani & Utama, 2020; Hendrawan & Rachmawati, 2019). Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan kebijakan mitigasi berbasis manajemen risiko dan keberlanjutan destinasi menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi hotel di kawasan pesisir rawan gempa dan tsunami seperti Hotel Merumatta Senggigi. Dengan demikian, penerapan konsep hotel tangguh bencana merupakan strategi manajerial yang esensial dalam mewujudkan pariwisata yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi mitigasi bencana di sektor perhotelan, dengan fokus pada Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat—kawasan pesisir yang berisiko gempa dan tsunami. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan menelaah, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesiapsiagaan dan efektivitas sistem mitigasi bencana yang diterapkan hotel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Hotel Merumatta Senggigi Lombok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Merumatta Senggigi merupakan salah satu hotel berbintang empat tertua di Pulau Lombok yang berperan penting dalam perkembangan pariwisata pesisir di Nusa Tenggara Barat. Berdiri sejak 1987 dan berlokasi di kawasan Pantai Senggigi, hotel ini menempati posisi strategis di pesisir barat Lombok yang memiliki potensi risiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Secara geografis, lokasi tersebut memberikan keunggulan

kompetitif sekaligus konsekuensi kerentanan terhadap ancaman bencana.

Dari sisi infrastruktur, hotel ini memiliki 166 unit kamar dengan berbagai tipe, serta fasilitas pendukung yang relatif lengkap, meliputi restoran tematik, kolam renang, spa, pusat kebugaran, lapangan tenis, dan ruang pertemuan. Fasilitas MICE menjadi salah satu kekuatan utama, ditunjang oleh beberapa ruang rapat berkapasitas 40–150 orang serta dua ballroom utama—Mayura dan Barugak—yang mampu menampung hingga 900 peserta. Ketersediaan fasilitas berskala besar ini menunjukkan kapasitas hotel dalam menyelenggarakan kegiatan korporasi maupun event pariwisata dalam jumlah besar.

Selain itu, hotel menyediakan berbagai layanan rekreasi dan penunjang operasional, seperti aktivitas olahraga, layanan wisata bahari, resepsionis 24 jam, serta fasilitas transaksi dan informasi wisata. Kelengkapan infrastruktur dan kapasitas hunian yang besar, dikombinasikan dengan lokasi di kawasan rawan bencana, menjadikan Hotel Merumatta Senggigi sebagai objek yang representatif dalam kajian penerapan konsep hotel tangguh bencana, khususnya dalam mengintegrasikan aspek keselamatan, kesiapsiagaan, dan keberlanjutan operasional di destinasi wisata pesisir.



Gambar 1. Fasilitas Hotel Merumatta

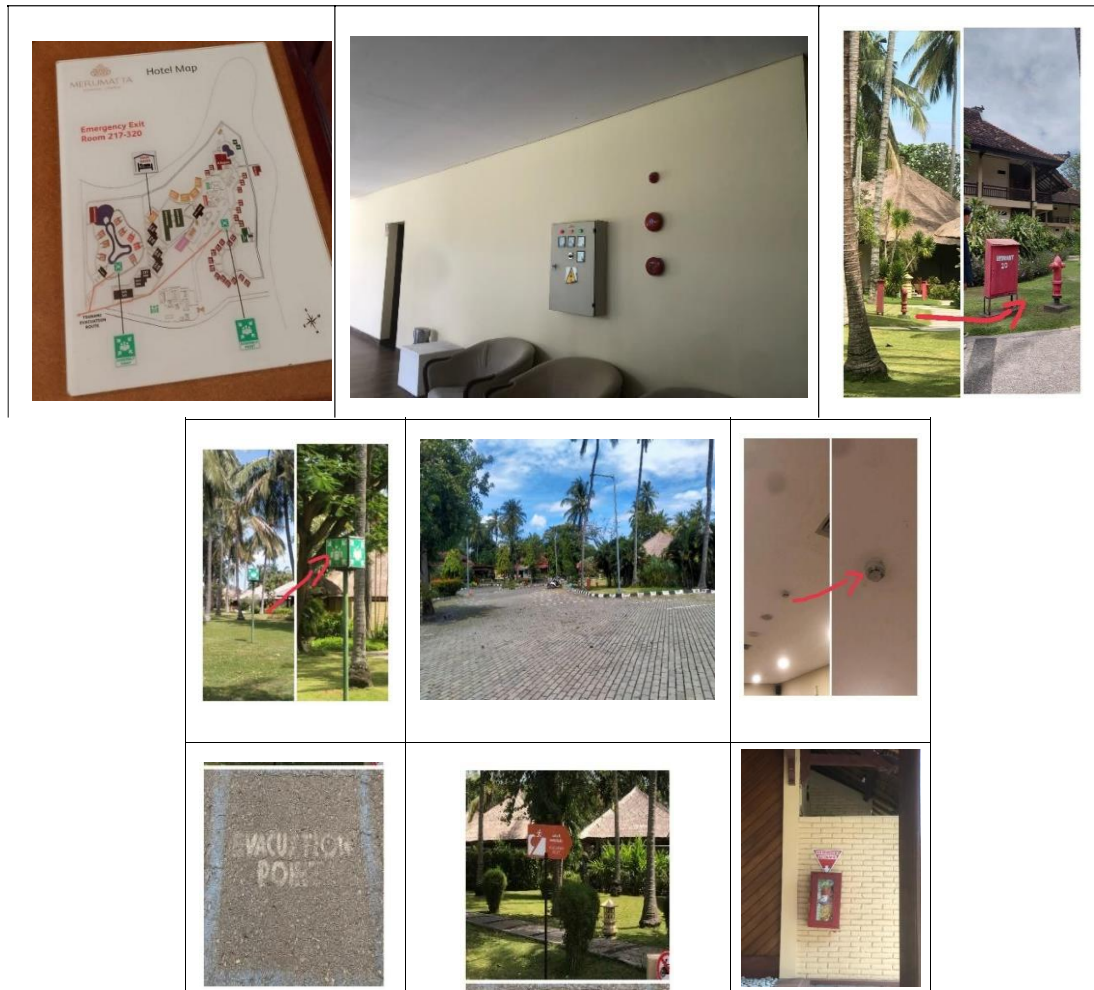
Sumber: Web Merumatta Hotel Lombok. <https://meruhotels.com/hotels/merumatta-senggigi-lombok> (2025)

2. Upaya Mitigasi Bencana di Hotel Merumatta Senggigi

Berdasarkan analisis kualitatif melalui observasi dan wawancara, Hotel Merumatta Senggigi menunjukkan penerapan mitigasi bencana yang relatif komprehensif pada aspek struktural, kelembagaan, dan operasional.

2.1 Infrastrukture Mitigasi dan Kesiapan Fisik

Hotel telah menyediakan jalur evakuasi, titik kumpul, sistem hydrant dan APAR, fire alarm, smoke detector, serta alarm tsunami di area strategis. Setiap kamar dilengkapi peta evakuasi, dan tersedia perlengkapan darurat seperti P3K, radio komunikasi, serta lampu darurat tenaga surya. Temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip mitigasi struktural dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan konsep manajemen risiko terintegrasi (Haddow et al., 2011). Namun, efektivitasnya bergantung pada pemeliharaan, audit berkala, dan penguatan kapasitas SDM.



Gambar 2. Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Fisik
Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

Temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip mitigasi struktural dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan konsep manajemen risiko terintegrasi (Haddow et al., 2011). Namun, efektivitasnya bergantung pada pemeliharaan, audit berkala, dan penguatan kapasitas SDM.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa efektivitas sarana dan prasarana mitigasi tersebut akan sangat bergantung pada aspek non-struktural, seperti pemeliharaan berkala, audit keselamatan, dan pelatihan rutin bagi staf. Tanpa adanya kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang berkelanjutan, fungsi infrastruktur kebencanaan berisiko menurun seiring waktu. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu memastikan bahwa seluruh perangkat mitigasi tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal melalui pengawasan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

2.2 Manajemen Kelembagaan dan Kesiapsiagaan Hotel

Secara kelembagaan, hotel membentuk *Emergency Response Team* (ERT) lintas divisi dengan koordinasi langsung di bawah General Manager. Struktur ini merepresentasikan prinsip *Incident Command System* (ICS) yang menekankan kejelasan komando dan koordinasi lintas fungsi. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip ISO 31000:2018 yang menekankan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara sistematis. Keterlibatan seluruh unit kerja

menunjukkan penerapan pendekatan partisipatif dalam manajemen risiko, memperkuat tata kelola kelembagaan serta meningkatkan kapasitas respons organisasi. Dengan demikian, mitigasi di hotel tidak hanya bersifat prosedural, tetapi telah terintegrasi dalam sistem manajemen dan budaya kerja.

2.3 Implementasi Teknologi dan Strategi Pemulihan

Dalam aspek teknologi, setiap kamar dilengkapi peta evakuasi dan petunjuk keselamatan, serta didukung lampu darurat tenaga surya di area strategis. Inovasi ini mencerminkan integrasi mitigasi dengan prinsip efisiensi energi dan keberlanjutan (*green resilience*).

Selain kesiapsiagaan, hotel juga memiliki rencana pemulihan operasional pascabencana yang mencakup pemeriksaan keselamatan penghuni, evaluasi struktur bangunan, dan dokumentasi kerusakan. Praktik ini sesuai dengan ketentuan pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta mendukung konsep resiliensi pariwisata yang menekankan kapasitas adaptif dan pemulihan cepat.

Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi tidak berhenti pada tahap respons darurat, tetapi mencakup strategi keberlanjutan operasional jangka panjang.

2.4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hotel menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana minimal dua kali setahun, bekerja sama dengan BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan meliputi penanganan gempa, kebakaran, dan prosedur evakuasi.

Partisipasi staf dan tamu (khususnya kegiatan MICE) dalam briefing keselamatan mencerminkan pendekatan inklusif berbasis kapasitas manusia (*human-centered mitigation*). Praktik ini sejalan dengan prinsip dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 yang menekankan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas komunitas sebagai inti pengurangan risiko bencana. Pendekatan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari mitigasi struktural menuju penguatan kapasitas individu dan organisasi sebagai faktor utama ketahanan.



Gambar. 3. Pelatihan dan Simulasi

Sumber: Dokumen Hotel (2025)

2.5 Koordinasi dengan Pihak Berwenang

Hotel menjalin koordinasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan aparat keamanan setempat. Penyediaan daftar kontak darurat di titik strategis merupakan implementasi prinsip komunikasi risiko dalam manajemen krisis. Meskipun demikian, koordinasi lintas lembaga masih bersifat fungsional dan belum sepenuhnya operasional dalam bentuk simulasi terpadu kawasan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan kolaboratif lintas sektor (*whole-of-society approach*) agar kesiapsiagaan tidak terbatas pada skala institusi, tetapi mencakup destinasi secara menyeluruh.

3 Tantangan Mitigasi di Kawasan Pantai Merumatta

Meskipun mitigasi internal hotel tergolong memadai, observasi menunjukkan bahwa area pantai di sekitar hotel belum dilengkapi rambu evakuasi, papan informasi kebencanaan, maupun titik kumpul khusus. Kesenjangan ini mengindikasikan belum terintegrasinya tata kelola risiko antara institusi hotel dan kawasan publik pesisir.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan wisatawan terhadap ancaman tsunami atau gelombang ekstrem, serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keselamatan destinasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas mitigasi di destinasi pesisir memerlukan tata kelola risiko terpadu (*disaster risk governance*) yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, penguatan sinergi kebijakan publik–privat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan destinasi wisata Senggigi yang tangguh bencana secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, Hotel Merumatta Senggigi telah menerapkan sistem mitigasi bencana secara komprehensif melalui penyediaan infrastruktur keselamatan, pembentukan *Emergency Response Team*, pemanfaatan teknologi pendukung, rencana pemulihan operasional, serta pelatihan dan simulasi berkala. Implementasi tersebut selaras dengan kerangka regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serta mencerminkan penerapan prinsip manajemen risiko dan resiliensi organisasi dalam industri perhotelan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan mitigasi pada kawasan pantai publik di sekitar hotel yang belum terintegrasi dalam sistem kesiapsiagaan destinasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi mitigasi pada skala kawasan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan destinasi wisata pesisir yang tangguh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggarasasi, N, H. Dkk. (2019). Mitigasi Bencana Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*. Vol.3 (1), 1-9
- [2] BNPB. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB.
- [3] BNPB. (2021). Pedoman Umum Mitigasi Bencana. Jakarta: BNPB.
- [4] Budiatiningsih, M., Hulfa, I., Rojabi, S. H., Putri, C. A., & Jumiarti, S. (2025). Profile of The Visitors' Knowledge Related to Disasters at Kuta Mandalika Beach, Central Lombok Regency. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 15-24.
- [5] Faturahman, B.M. (2018). Konseptual Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 3 (2), 122-134.
- [6] Haddow, G. D., Bullock, J. A., & Coppola, D. P. (2011). *Introduction to Emergency Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

-
- [7] Hendrawan, D., & Rachmawati, L. (2019). Kesiapsiagaan hotel terhadap potensi bencana Gunung Merapi di Yogyakarta. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 101–114.
- [8] Hotel di Lombok Minim Wawasan Soal Bencana. Diakses melalui web <https://kbr.id/articles/indeks/hotel-di-lombok-minim-wawasan-soal-bencana>, yang diakses pada 22 Oktober 2025 pukul 12.03 WITA.
- [9] Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- [10] Merumatta Hotel Lombok. Diakses melalui web <https://meruhotels.com/hotels/merumatta-senggigi-lombok>, yang diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 10.07 WITA
- [11] Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1), 127–150.
- [12] Prasetyo, A. (2020). Hotel Tangguh Bencana: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Pariwisata dan Kebencanaan*, 5(2), 45–58.
- [13] Suryani, N. M., & Utama, I. G. B. R. (2020). Disaster preparedness in the hospitality sector: A study of coastal hotels in Bali. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 8(3), 122–135.
- [14] Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- [15] Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- [16] UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations.
- [17] Wahyuni, R. (2018). Pariwisata Berbasis Mitigasi: Strategi Menjaga Keberlanjutan Wisata di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13(1), 55–68.
- [18] Wicara Desa. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana di Desa Senggigi. *Jurnal Wicara Desa Universitas Mataram*.
- [19] Wikke, I. S. (2021) *Mitigasi Bencana*. Jawa Barat. CV Adanu Abimata.
- [20] Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. New York: Routledge.
- [21] Wulung, A., & Abdullah, I. (2021). Program Kesiapsiagaan Tsunami Usaha Hotel di Kawasan Pariwisata Anyer, Provinsi Banten. *Jurnal Sains dan Humaniora (JSH)*, Politeknik Negeri Balikpapan.
- [22] URL: <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/1075>